

# **PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR**

**Sitti Ainun**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

**Muhammad Guntur**

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar  
Email: [Guntur357unm@gmail.com](mailto:Guntur357unm@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan lalu lintas barang bawaan penumpang internasional di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang diukur dengan indikator menetapkan alat ukur (standar), mengadakan penilaian (evaluasi) dan tindakan perbaikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi, dan member check. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dilakukan oleh Bea Cukai sudah dilakukan dengan baik, pengawasan barang bawaan penumpang dapat dilihat dari menetapkan alat ukur (standar), berjalan dengan efektif karena pelaksanaan pengawasan barang bawaan penumpang terdapat pada Peraturan DJBC No. PER-09/BC/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, peraturan tersebut menjadi standar operasional prosedur bagi pegawai bea cukai sehingga jika ada penumpang yang membawa barang melebihi nilai pabean maka akan ditindak lanjuti dengan cara dikenakan bea masuk atas kelebihan barang yang dibawa penumpang tersebut. Mengadakan penilaian (evaluasi) dikategorikan berjalan Kurang Efektif karena adanya kendala dalam proses pengawasan seperti terjadinya modus pelanggaran yang semakin meningkat dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi data pada tahun 2017-2019 dan mesin X-ray yang digunakan mudah rusak sehingga akan menghambat proses pengawasan dan pelayanan barang bawaan penumpang. Mengadakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bea Cukai cukup Efektif, hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak bea cukai yaitu mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang barang bawaan penumpang dan memberikan pajak bea masuk bagi penumpang yang membawa barang melebihi batas nilai pabean yang telah ditentukan serta menindak lanjuti bagi penumpang yang membawa barang larangan atau barang yang dibatasi.*

**Kata Kunci:** Pengawasan, Bea Cukai dan Barang Bawaan Penumpang

## **1. Latar Belakang**

Seiring dengan meningkatnya perekonomian global, peningkatan lalu lintas barang dan orang antar negara menjadi suatu hal yang lumrah. Hal ini tentu saja berdampak pada banyaknya warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri dan kembali ke tanah air.

Terkait hal tersebut, pemerintah memiliki peran dan tugas yang penting untuk menjaga dan melindungi sumber daya dalam negeri, serta manusianya. Hal ini dilakukan melalui badan atau lembaga yang memiliki fungsi untuk mengurus dan bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan lalu lintas barang dan orang yang terjadi secara khusus di pintu masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa untuk menambah pendapatan atau devisa negara sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Adapun pengertian daerah pabean adalah wilayah Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan sebuah lembaga yang

sangat berperan penting untuk mengawasi dan mengontrol keluar dan masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015 Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan menyebutkan bahwa Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 /PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan

perkara, dan penindakan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba, dan pengelolaan sarana operasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-09/BC/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut yang membawa barang dari dalam maupun dari luar negeri wajib melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Adapun barang ekspor yang perlu dilaporkan terdiri atas: Perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya; Barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean; Uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/ atau barang ekspor yang dikenakan bea keluar.

Penumpang yang membawa barang ekspor sebagaimana dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan eksporss barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket, dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditanda tangani oleh eksportir kepada pejabat bea dan

cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh penumpang di terminal keberangkatan internasional.

Adapun barang ekspor yang akan dibawa kembali oleh penumpang harus diberitaskan dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali dan Barang Impor yang dibawa penumpang wajib diberitaskan kepada pejabat Bea dan Cukai yang dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, adapun pemberitahuan secara tertulis dapat disampaikan dengan menggunakan *Custum Declaration* atau pemberitahuan impor barang khusus.

Terhadap barang impor bawaan pribadi penumpang yang berjumlah tidak melebihi 500,00 USD per orang diberikan pembebasan bea masuk, sedangkan dari kelebihan batasan yang telah di tetapkan, maka akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, barang pribadi Penumpang yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan berupa: 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Pada dasarnya barang bawaan penumpang dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, barang bawaan penumpang yang bukan termasuk barang dagangan. Misalnya barang untuk keperluan pribadi selama di

perjalanan, barang yang dibeli atau diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa lagi keluar negeri. Kedua, barang dagangan yaitu barang yang menurut jenis, sifat, dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, di impor untuk tujuan di perjual belikan. Misalnya barang contoh, bahan baku, dan/atau barang yang akan digunakan.

Adapun langkah-langkah pengawasan secara teknis terhadap barang bawaan penumpang yaitu: wajib menggunakan sarung tangan dan bila perlu menggunakan masker, menyapa dengan salam, memeriksa paspor penumpang, meminta penumpang untuk membuka barang bawaannya, periksa dengan teliti barang bawaan penumpang dan pastikan tidak ada barang yang terlewatkan, minta penjelasan dari penumpang jika ada barang yang mencurigakan dan apabila diperlukan petugas dapat membuka barang yang dicurigakan sebagai barang terlarang, bila ada barang yang tidak sesuai dengan ketentuan penumpang diarahkan ke Kantor Bea dan Cukai untuk diproses lebih lanjut, dan jika ada penumpang tidak membawa barang yang menyalahi aturan maka penumpang tersebut dipersilahkan melanjutkan perjalanan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penumpang wajib menyampaikan barang bawaan impor yang diberitahukan kepada petugas bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan *customs declaration* (CD) untuk barang pribadi penumpang dan pemberitahuan impor barang (PIB) untuk barang dagangan.

Dari hasil pengamatan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, permasalahan yang sering terjadi pada saat pemeriksaan barang bawaan penumpang masih ada penumpang internasional yang masih kurang pemahaman terhadap peraturan kepabeanan, khususnya barang bawaan penumpang, dan tarif bea masuk dan pajak pada produk yang dibeli serta kurangnya pengetahuan regulasi pabean.

Seperti barang impor bawaan pribadi penumpang yang berjumlah tidak melebihi FOB USD 500.00 per-orang dan tidak terhitung akumulasi per-keluarga, dan masalah dokumen pelengkap pembawaan uang tunai mata uang asing dengan jumlah lebih dari Rp. 100.000.000 harus mengisi *customs declaration* (CD) dan melaporkan kepada pihak Bank Indonesia untuk kelengkapan dokumen. Berangkat dari beberapa teori, opini dan penelitian sebelumnya maka peneliti ingin meneliti **“Pengawasan Lalu Lintas Barang Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan pada uraian dilatar belakang sebelumnya maka, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Lalu Lintas Barang Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami Pengawasan Lalu Lintas Barang

Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

#### **4. Tinjauan Pustaka**

##### **1). Konsep Kebijakan Publik**

Mustopadidjaja dalam Tahir (2015, hal. 21) menjelaskan bahwa istilah kebijakan sentiasa digunakan dalam kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Anderson dalam Tahir (2015, hal. 21) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008, hal. 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2016, hal. 19) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan yang diberikan oleh Dye ini bisa di anggap agak tepat, namun batasan yang ada masih belum cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

W.I. Jenkins dalam Wahab (2014, hal. 15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang di ambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan.

##### **2). Konsep Pengawasan**

Pengawasan merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tujuan organisasi agar dapat tercapai. Stoner, James AF. & R. Edward Freeman dalam Effendi (2015, hal. 224) mengatakan bahwa istilah pengawasan sama dengan pengendalian manajemen yaitu proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan.

George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam Karyoto (2016, hal. 118) juga mengatakan pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur hasil yang di capai dan hasil yang ditentukan serta untuk mencari penyebab pelanggaran guna dilakukan tindakan perbaikan.

Karyoto (2016, hal. 120) pengawasan adalah suatu pengendalian yang diterapkan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur. Kegiatan perencanaan ini menyangkut berbagai aspek seperti tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang akan dilakukan, serta kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Henry Fayol dalam Effendi (2015, hal. 224) pengawasan terdiri atas memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, atau sesuai intruksi yang

dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ada. Suatu objek dapat saja menunjukkan kelemahan dan kesalahan terhadap aktivitas yang ada agar dapat mencegah untuk terjadi kembali kesalahan.

Menurut Mappaenre (2009, hal. 105–106) pengawasan pada dasarnya dikenal adanya empat macam, yaitu:

- 1) Pengawasan dari dalam. Pengawasan yang dilakukan oleh unit yang dibentuk dalam organisasi sendiri, dan bertindak atas nama pimpinan organisasi.
- 2) Pengawasan di luar. Pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas di luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, baik atas permintaan pimpinan organisasi yang bersangkutan maupun bukan atas permintaannya.
- 3) Pengawasan preventif. Pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana dilaksanakan. Dari pengawasan ini dapat dicegah terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan.
- 4) Pengawasan represif. Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pekerjaan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Menurut Siagian dalam Effendi (2015, hal. 225) terdapat dua macam pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang di jalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat, dan membuat laporan di tempat.
- 2) Pengawasan tidak langsung, ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Pengawasan tidak langsung berupa: laporan secara lisan, laporan secara tertulis dan laporan khusus.

Menurut Manullang (2008, hal. 185) Terdapat empat proses pengawasan yaitu:

- 1) Menetapkan alat pengukur (*standart*) Pemimpin harus menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Alat ukur atau standar merupakan hal yang amat penting dilakukan karena tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap hasil pekerjaan. Berdasarkan

standar tersebut kemudian diadakan penilaian.

2) Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Yakni evaluasi atau membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang diukur dengan standar yang telah ditentukan sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan apakah sesuai dengan proses rencana sebelumnya yang telah ditetapkan.

3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Yakni tindakan yang diambil antara hasil pekerjaan dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini nantinya akan melihat masalah yang dihadapi pada saat proses kegiatan berlangsung. Tindakan perbaikan dilakukan dengan maksud apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan serta dapat terealisasi.

### 3). Konsep Bea Cukai

Bea Cukai sesungguhnya terdiri dari dua kata yaitu bea dan cukai. Istilah atau pengertian dari bea cukai sendiri tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan. Pengertian Bea adalah pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor yang ditentukan oleh negara, sedangkan Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu yang terdapat pada undang-undang. Maka bea cukai memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Bea cukai merupakan instansi yang didirikan oleh pemerintah yang diatur dibawah direktorat jendral bea dan cukai yang berperan untuk mengawasi dan mengontrol keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri memiliki tanggung jawab penuh serta berada dibawah naungan Kementerian Keuangan.

### 4). Konsep Lalu Lintas Barang Penumpang

Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Lalu lintas merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan ruang di darat, laut dan udara, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas lainnya.

Menurut Bea dan Cukai Lalu lintas barang memiliki dua jalur proses pemeriksaan barang bawaan yaitu jalur hijau, dan jalur merah.

- a. Jalur Hijau yaitu proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

b. Sedangkan Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Adapun kriteria jenis barang impor yang termasuk dalam kategori pengeluaran melalui jalur merah dan pemeriksaan fisik seperti yaitu:

- 1) Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi (*non personal use*)
- 2) Berupa hewan, ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan.
- 3) Berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.
- 4) Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau
- 5) Uang tunai dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) atau lebih.

Barang bawaan penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang ingin melintasi perbatasan wilayah dengan menggunakan alat transportasi baik di darat, udara maupun laut. Barang bawaan penumpang terbagi menjadi dua yaitu barang pribadi penumpang (*Personal Use*) yang bukan termasuk

barang dagangan dan bukan barang pribadi (*Non Personal Use*) barang dagangan.

## **5. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara mendalam dan jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang datanya menggunakan kata-kata tertulis, uraian informasi, dan perilaku subjek yang diamati.

## **6. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian yang dipaparkan dalam penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan yakni, Bagaimana Pengawasan Lalu Lintas Barang Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ?

Dari data-data yang telah diperoleh dan telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun variabel penelitian yang akan dibahas, yaitu Proses Pengawasan menurut M. Manulang (2005) yang memiliki tiga Indikator yaitu; Mengadakan alat pengukur (*standar*), Mengadakan penilaian (*evaluate*) dan Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai pengumpulan alat, pengumpulan data, dengan penentuan



beberapa informan yang dianggap mempunyai kapabilitas dan mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Kepala Staf Penindakan dan Penyidikan dan Seksi Penindakan dan Penyidikan. Ada tiga indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan rekapitulasi ketiga indikator proses pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Lalu Lintas Barang Bawaan Penumpang Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ada dua indikator yang efektif seperti Menetapkan Alat Ukur (Standar) dan Mengadakan Tindakan Perbaikan sementara ada satu indikator yang kurang efektif yaitu Mengadakan Penilaian (Evaluasi). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan Alat Ukur (Standar)

Hasil yang diperoleh sudah efektif. Dari pelaksanaan menetapkan alat ukur sudah di kategorikan Efektif karena Bea Cukai telah melakukan pengawasan sesuai standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana pengawasan.

2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Hasil yang diperoleh di kategorikan Kurang efektif karena dalam proses pengawasan masih terkendala peralatan yang di gunakan oleh pihak bea dan cukai serta jumlah pelanggaran yang makin meningkat

dari tahun 2017-2019 dapat dilihat dari rekap data pelanggaran dan penumpang internasional di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Hasil yang diperoleh sudah di kategorikan Efektif karena pihak bea cukai telah melakukan upaya memberikan informasi kepada masyarakat tentang aturan barang bawaan penumpang melalui sosialisasi, media sosial bahkan media cetak serta pihak Bea Cukai telah melaksanakan penindakan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor yang dibawah oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

## 7. Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai Pengawasan Lalu Lintas Barang Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. menetapkan alat ukur (standar), berjalan dengan efektif karena pelaksanaan pengawasan barang bawaan penumpang terdapat pada Peraturan DJBC No. PER-09/BC/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, peraturan tersebut menjadi

standar operasional prosedur bagi pegawai bea cukai sehingga jika ada penumpang yang membawa barang melebihi nilai pabean maka akan ditindak lanjuti dengan cara dikenakan bea masuk atas kelebihan barang yang dibawa penumpang tersebut.

2. Mengadakan penilaian (evaluasi), berjalan kurang efektif karena adanya kendala dalam proses pengawasan seperti terjadinya modus pelanggaran yang semakin meningkat dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi data pada tahun 2017-2019 dan mesin X-ray yang digunakan mudah rusak sehingga akan menghambat proses pengawasan dan pelayanan barang bawaan penumpang.
3. Mengadakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bea Cukai cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak bea cukai yaitu mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang barang bawaan penumpang dan memberikan pajak bea masuk bagi penumpang yang membawa barang melebihi batas nilai pabean yang telah ditentukan serta menindak lanjuti bagi penumpang yang membawa barang larangan atau barang yang dibatasi.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan implikasi dari hasil penelitian ini bahwa pentingnya pengawasan yang dilakukan terhadap lalu lintas barang bawaan penumpang

di Bandara Sultan Hasanuddin Internasional Makassar yang dilakukan oleh Pihak Bea Cukai. Pengawasan ini dilakukan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh para penumpang. Hasil penelitian ini diharapkan pengawasan yang dilakukan terhadap lalu lintas barang bawaan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Internasional Makassar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi dan mentaati segala peraturan lalu lintas barang bawaan penumpang yang telah ditetapkan sebelumnya guna untuk melindungi negara dari barang-barang yang dilarang yang dapat merusak negara.

#### **C. Saran**

1. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea cukai guna untuk menghindari modus pelanggaran dan meningkatkan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang bawaan penumpang.
2. Lebih meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan lalu lintas barang bawaan penumpang sehingga penumpang yang ingin bepergian jauh dapat membatasi barang yang seharusnya dibawa yang tidak melanggar peraturan tersebut.

#### **8. Daftar Pustaka**

##### **1) Sumber Buku**

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cet 2. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, U. 2015. *Asas Manajemen*. Cet 2 Ed 2 ed.

- Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen; Teori, Definisi dan Konsep* Ed 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cet 20. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mappaenre, A. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cet 2. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cet 2. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, H. S. A. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Cet 2 Ed 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2) Sumber Hukum**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, (2006).
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, (2010).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015 Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 /PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, (2015).
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-09/BC/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, (2018).